

# **EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR MELALUI UPK- SPP, DI WILAYAH KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA**

**Munjiati Munawaroh**

**Hasnah Rimiati**

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: munjiatim@yahoo.com----- hasnahrimiyati@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*This study aimed to evaluate the causes of the slow development of the women business community, although it has received a revolving loan from UPK SPP, so it can be used as an evaluation for UPK SPP (Unit of saving and loan for women community) at Bantul regency in Yogyakarta in particular, also for the Indonesian government related institution. UPK SPP conduct a revolving fund management unit of government that is allocated to provide savings and loan services to the public especially women.*

*This study used a qualitative descriptive approach. The problems of this research are: (1) How does the Government Empowering Rural Village business Community especially for women. (2) How are the developments of the business community revolving loan recipients (3)What are supporting and inhibiting factors society business development loan recipients.*

*Methods of collecting and analysis data in this study using interviews and technical Focus Group Discussion (FGD). Interviews were conducted with the chief executive of UPK SPP while FGD conducted with board members, facilitators and beneficiaries.*

*The results of this study are expected to evaluate the causes of the slow development of the women business community, although it has received a revolving loan from UPK SPP. The result will be described in the fishbone diagram. The cause of the slow development of women business community could be caused by materials, methods, machines, measurements, environments, and people.*

*Keywords: revolving loan, women business communities, fishbone diagram*

## **PENDAHULUAN**

PNPM Mandiri adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri

Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Program PNPM Mandiri merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. Program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri adalah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri diharapkan cakupan pembangunan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan.

UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Berberapa keberhasilan PKK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

UPK SPP di Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul Yogyakarta saat ini telah memiliki 815 nasabah yang terbagi menjadi 132 kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 5 sampai 10 orang, dengan berbagai latar belakang jenis usaha. UPK SPP tersebut telah berjalan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Masyarakat penerima pinjaman bergulir menyambut dengan antusias, terbukti dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat dan jumlah dana bergulir UPK SPP yang berkembang pesat dalam jumlah Rupiahnya.

Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat diikuti dengan pendampingan usaha dan mengikutsertakan mereka dalam pameran-pameran. Meski demikian, perkembangan usaha masyarakat penerima bantuan pinjaman bergulir tersebut usahanya kebanyakan belum berkembang, bahkan ada yang terpaksa ditutup.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini:

Masyarakat penerima pinjaman bergulir perkembangan usahanya relatif lambat (belum berkembang dengan pesat), yang dapat dilihat dari kebanyakan usaha yang tidak terlihat perkembangannya (berdasarkan ukuran usaha, peningkatan produksi, peningkatan omzet, pembukaan cabang dan sebagainya).

Bahkan ada beberapa usaha yang mati atau tutup. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan evaluasi faktor penyebab lambatnya perkembangan usaha masyarakat tersebut, meskipun telah menerima pinjaman bergulir dari UPK SPP. Agar lebih terarah maka fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa (2) Perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir (3) Faktor pendukung dan penghambat perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman.

Penelitian ini ingin mengevaluasi faktor penyebab lambatnya perkembangan usaha masyarakat, meskipun telah menerima pinjaman bergulir dari UPK SPP, sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi UPK SPP wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta khususnya, dan pemerintah Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Program dianggap baik jika mengandung unsur pembaharuan, ada suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program juga dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kondisi yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi melalui suatu program. Program yang baik harus memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya: (a) Tujuan program harus dirumuskan dengan jelas, (b) didukung peralatan yang memadai untuk mencapai tujuan, (c) kebijakan yang konsisten untuk mencapai program seefektif mungkin, (d) biaya-biaya pelaksanaan, (e) berbagai upaya dibidang manajemen.

### **Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 Pasal 23 Pemerintahan Desa

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pasal 24 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Kerja Sama antar Desa**

Kerja sama antar Desa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 91 disebutkan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

#### **Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Di dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat (Sutrisno, 2005) terdapat beberapa cara, yaitu: (a) *buttom up approach*, (b) partisipasi, (c) keberlanjutan kemitraan dengan masyarakat, (d) keterpaduan, (e) keuntungan sosial dan ekonomi.

### **Konsep Keberhasilan Usaha**

Menurut Suyanto (2010), bahwa keberhasilan suatu usaha dalam industri kecil dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberhasilan dari usaha industri kecil dapat dilihat dari kinerjanya, ukuran keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni: kinerja keuangan dan *image* perusahaan. Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang superior dapat meningkatkan *performance* usahanya dilihat dari peningkatan profit dan pertumbuhan usaha yang dijalankan.

Suryana (2011), mengatakan bahwa seseorang agar menjadi wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (*business vision*) yang jelas, ada kemauan serta keberanian dalam menghadapi resiko baik waktu maupun uang".

Kinerja perusahaan adalah *output* dari berbagai faktor di atas yang oleh karenanya ukuran ini menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat adaptabilitas bisnis dengan lingkungannya. Kinerja usaha perlu dihubungkan dengan target perusahaan yang ditentukan oleh manajer-pemilik usaha. Kinerja usaha merupakan tolok ukur untuk menilai seberapa besar tingkat pencapaian suatu target atau tujuan usaha.

Sementara menurut Ina Primiana (2009), keberhasilan usaha dilihat dari permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif dan tercapainya tujuan organisasi. Henry Faizal Noor (2007), bahwa keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya apabila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha adalah keberhasilan bisnis dalam mencapai tujuannya, dapat dicapai oleh wirausaha yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara pro-aktif dan hal tersebut terlihat dari usaha dari wirausaha dimana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya dan menggambarkan lebih dari yang lainnya yang sederajat atau sekelasnya, dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis, target perusahaan yang ditentukan oleh manajer-pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan keberhasilan usaha juga dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai islami dalam menjalankan bisnis tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rimiyati dan Munawaroh (2014), dilakukan pada pengusaha UMKM Muslim di Kota Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa penerapan nilai-nilai kewirausahaan islami yaitu: kejujuran, kemauan bekerja keras, menepati janji, tertib administrasi, selalu berdoa, membayar zakat dan sedekah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Semua data dikumpulkan dan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan yaitu: Pengurus UPK SPP (Unit Pelaksana Kegiatan-Simpan Pinjam Perempuan), di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen aturan pelaksanaan kegiatan UPK SPP, struktur organisasi, Panduan Teknis Operasional (PTO), dan sebagainya.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara, dilakukan dengan ketua UPK SPP Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta untuk memperoleh gambaran umum mengenai UPK secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, pengurus dan tugas masing-masing pengurus, kader, badan pengawas serta gambaran masyarakat penerima dana dan sebagainya.
- 2) Teknik *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah. FGD dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam UPK SPP yaitu: Pengurus UPK SPP; Badan Pengawas UPK SPP; Kader UPK SPP; Masyarakat penerima dana bergulir UPK SPP

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dipakai adalah metode kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui akar masalah dan penyebab dari tidak berkembangnya usaha mayoritas masyarakat penerima dana pinjaman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Analisis *Fishbone*.

Hasil FGD akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi sebab-sebab lambatnya berkembangnya usaha masyarakat penerima pinjaman menggunakan diagram *Fishbone*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Obyek Dan Subyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah UPK SPP Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, sedang subyeknya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam operasional UPK SPP di kecamatan Kasihan kabupaten Bantul Yogyakarta.

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berada di sebelah Utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Kasihan mempunyai luas wilayah 3.437,957 Ha. Desa di wilayah administratif Kecamatan Kasihan terdiri dari Desa Ngestiharjo; Desa Bangunjiwo; Desa Tirtonirmolo; Desa Tamantirto (<http://kec-kasihan.bantulkab.go.id/hal/profil>):

Kecamatan Kasihan dihuni oleh 15.559 kepala keluarga. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kasihan adalah 77.261 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 38.582 orang dan penduduk perempuan 38.679 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kasihan adalah 2.247 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kasihan adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 12.740 orang atau 16,5 % penduduk Kecamatan Kasihan bekerja di sektor pertanian. Sentra industri di wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul meliputi: Kasongan dikenal dengan Sentra kerajinan gerabahnya; Lemah Dadi Bangunjiwo merupakan



Sentra kerajinan pahat batu; Gendeng Bangunjiwo merupakan Sentra kerajinan ukir kulit.

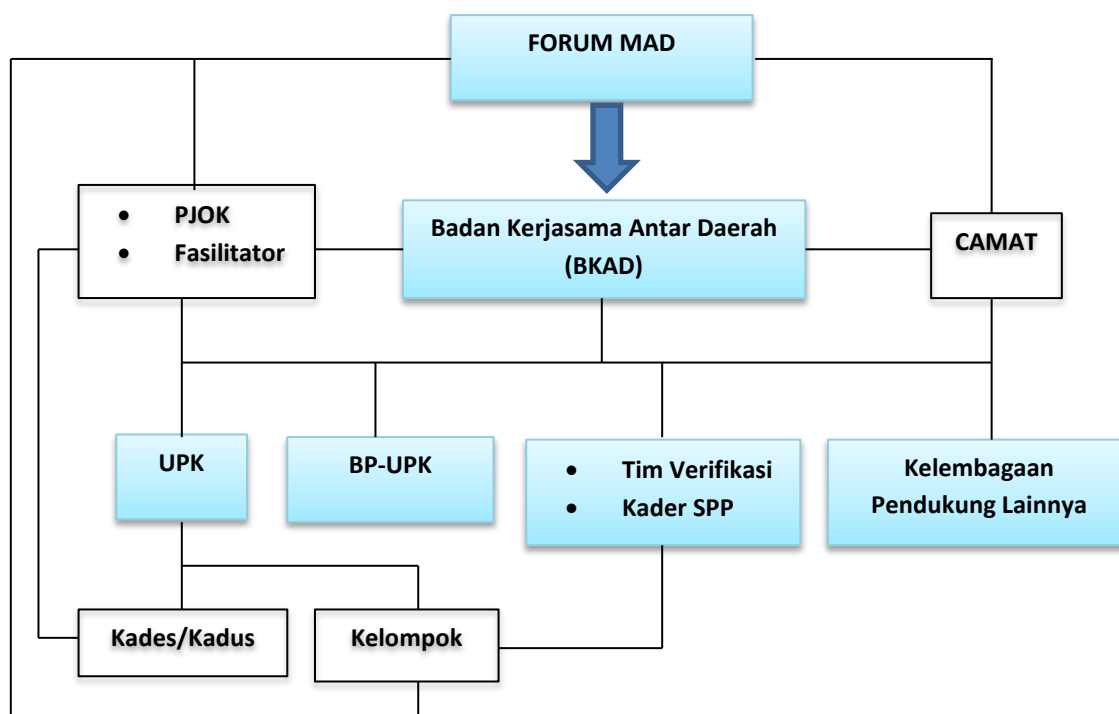
### **Sejarah singkat UPK SPP Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta**

Pada tahun 2007 Pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri. Program PNPM Mandiri merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut.

Pada tahun 2007 sebagai kelanjutan dari PPK, pemerintah mengucurkan dana dikaitkan dengan rehab bantuan gempa. Pengalokasian dana dari pemerintah tersebut mengikuti Panduan Teknis Operasional (PTO) th 2006. Panduan Teknis Operasional SPP UPK mengatur bahwa dana yang turun 75% dialokasikan untuk prasarana seperti (bangunan fisik: perbaikan jalan umum, gedung TK, pasar desa, gedung pertemuan desa sedangkan 25% dialokasikan untuk UPK SPP. Pada akhir tahun 2015 melalui aturan Depdagri 2006 menyatakan bahwa PNPM berakhir. Meski PNPM dari pemerintah berakhir, namun aktifitas UPK SPP diijinkan untuk terus berjalan melanjutkan dana bergulir.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi BKAD Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, periode 2012-2015, disajikan dalam Gambar 1 berikut ini:



Berdasarkan gambar 1. dapat diketahui bahwa posisi tertinggi adalah forum MAD (Musyawarah Antar Desa). Musyawarah Antar Desa merupakan musyawarah yang diikuti oleh semua desa dalam lingkup wilayah 1 kecamatan. MAD Kecamatan Kasihan dilakukan oleh kepala desa yang ada di kecamatan yaitu desa Kasihan, Ngestiharjo, Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo. Untuk kelancaran dan kelestarian kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) telah dibentuk kelembagaan pengelolaannya yang terdiri dari UPK, BP-UPK, BKAD, dan kelompok SPP itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK SPP kecamatan Kasihan kabupaten Bantul Yogyakarta bapak Cahyadi, apabila dalam pelaksanaan terjadi permasalahan bisa dibentuk tim penyehat pinjaman dan Tim Verifikasi pada saat Verifikasi Usulan, sebelum MAD Prioritas dan penetapan Perguliran.

UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan dan mengawasi Pengelolaan Kegiatan Program PNPM-Mandiri perdesaan.
2. Melaksanakan Kegiatan Pelestarian Dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP)
3. Membantu Memafasilitas permasalahan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program PNPM-Mandiri-Perdesaan yang ada didesa.
4. Melakukan Administrasi dan pelaporan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman dana bergulir melalui UPK SPP di wilayah kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta dilakukan dengan proses wawancara dan FGD. Wawancara dilakukan dengan ketua UPK SPP bapak Cahyadi, sedangkan FGD dilakukan dengan beberapa pihak yang terdapat dalam struktur organisasi, yaitu FGD dengan BKAD, FGD dengan BP-UPK, FGD dengan pengurus UPK SPP, FGD dengan kader UPK SPP, serta FGD dengan masyarakat penerima dana UPK SPP.

### Hasil Wawancara

UPK SPP di kecamatan Kasihan Bantul telah berlangsung sejak tahun 2007. Awal dana bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan UPK SPP adalah sebesar Rp.824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang berkembang hingga pada tahun 2016 ini mencapai 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah). Perkembangan dana yang begitu besar itu menunjukkan keberhasilan segenap pengelola UPK SPP dalam mengelola dana bergulir untuk masyarakat.

Saat ini UPK SPP kecamatan Kasihan kabupaten Bantul memiliki 808 pemanfaat dana bergulir SPP dengan total dana bergulir sebesar Rp. 3.845.000.000, yang tersebar ke 4 desa yaitu: Bangunjiwo, Tamantirto, Ngestiharjo dan Tirtonirmolo. Bisnis mereka dikelompokkan menjadi 9 kelompok, yaitu perdagangan, kerajinan, jasa, konveksi, produksi, peternakan, mebel, pertanian.

Berdasarkan wawancara awal dengan ketua UPK SPP bapak Cahyadi dianalisis bahwa mayoritas (kira-kira 60%) usaha para penerima dana perkembangannya lambat meskipun mereka telah menerima pinjaman dana dari UPK SPP, sedangkan kira-kira 30% penerima dana berkembang dan sisanya sekitar 10% kolaps atau tutup.

Mereka yang berkembang usahanya menggunakan dana untuk investasi peralatan dan menambah modal serta membangun kios. Bahkan beberapa anggota tidak melakukan peminjaman lagi karena mereka sudah cukup modalnya.

Mereka yang kolaps dikarenakan oleh adanya pinjaman lain selain dari UPK SPP, seperti meminjam dari rentenir. Selain itu mereka juga ada yang menggunakan pinjaman tersebut untuk konsumtif. Ada pula yang kolaps karena tidak mampu bersaing serta manajemen yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dievaluasi mengapa perkembangan usaha penerima dana tersebut lambat perkembangannya.

### **Hasil FGD dengan BKAD, BP-UPK, UPK SPP, KADER UPK SPP, Penerima Dana Pinjaman Bergulir**

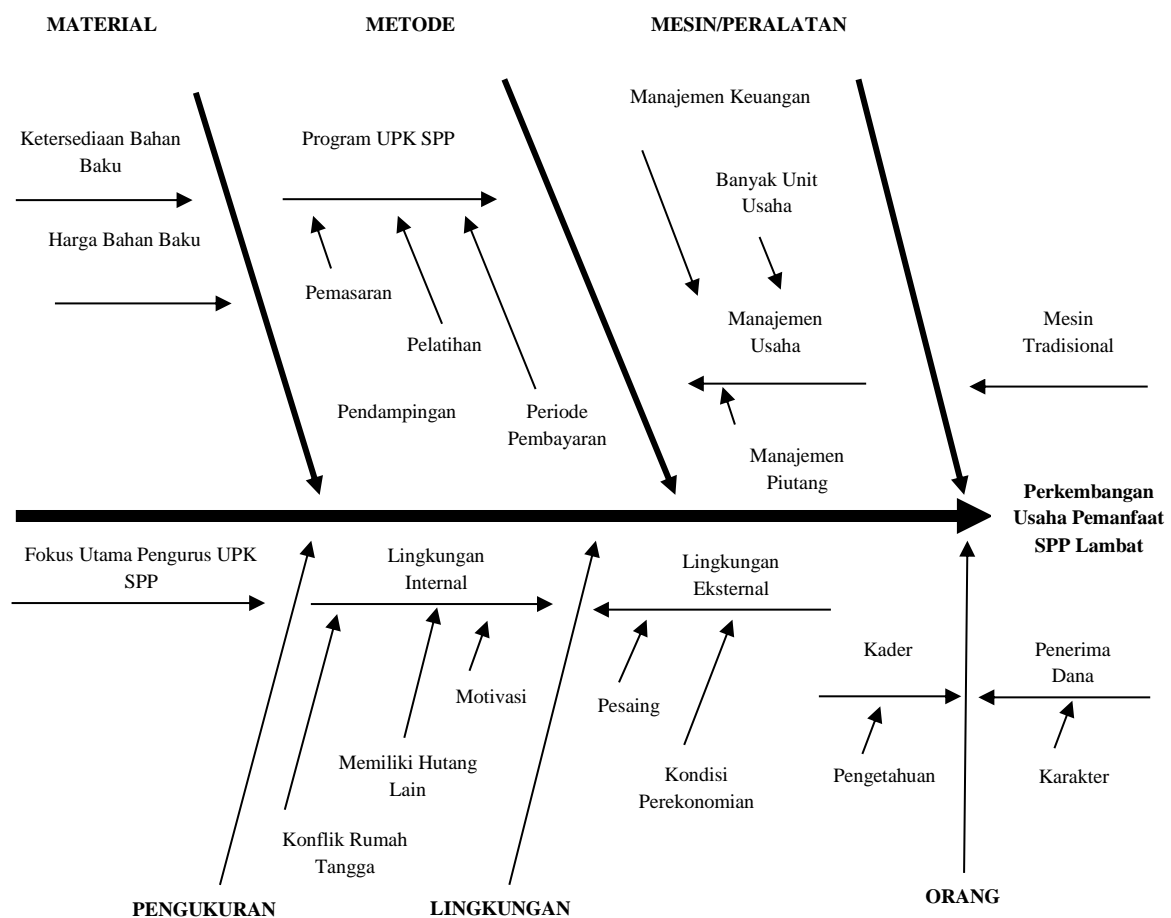
Berdasarkan hasil FGD dengan BKAD, FGD dengan BP-UPK, FGD dengan pengurus UPK SPP, FGD dengan kader UPK SPP, serta FGD dengan masyarakat penerima dana UPK SPP, dapat dianalisis bahwa operasional pengguliran dana UPK SPP tergolong sukses dengan tingkat pengembalian yang lancar. Dilihat dari sisi perkembangan usaha, 30% dari masyarakat penerima dana UPK SPP mengalami perkembangan usaha berkat pinjaman tersebut, 10% gagal dan 60%nya perkembangannya lambat.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya perkembangan usaha masyarakat penerima dana UPK SPP tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana digambarkan dengan diagram *fishbone* (diagram tulang ikan) pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2 permasalahan yang ada terdapat pada bagian kepala ikan paling kanan, yaitu Perkembangan Usaha Penerima UPK SPP Lambat. Penyebab

lambatnya perkembangan usaha penerima dana UPK SPP ada beberapa faktor yang digambarkan pada tulang-tulang ikannya pada diagram tersebut, yaitu:

1. Material
2. Metode
3. Mesin
4. Pengukuran
5. Lingkungan
6. Orang

Berikut ini penjelasan masing-masing faktor yang digambarkan dalam diagram *fishbone* gambar 2.



**Gambar 2. Diagram Fishbone Perkembangan Usaha Pemanfaat SPP Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta lambat**

## PEMBAHASAN

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, salah satunya lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Pedesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) melalui pemberian dana bergulir UPK SPP yang dialokasikan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima pinjaman dana bergulir UPK SPP di Kecamatan Kasihan Bantul mengalami perkembangan walaupun masih lambat. Dari hasil FGD diperoleh data bahwa 30% dari masyarakat penerima dana UPK SPP mengalami perkembangan, 10% gagal, dan 60% perkembangan usahanya lambat. Data tersebut didukung pula dari hasil wawancara awal dengan ketua UPK SPP Bapak Cahyadi dianalisis bahwa mayoritas (kira-kira 60%) usaha para penerima dana perkembangannya lambat meskipun mereka telah menerima pinjaman dana dari UPK SPP, sedangkan kira-kira 30% penerima dana berkembang dan sisanya sekitar 10% usahanya kolaps atau tutup.

Faktor penghambat lambatnya perkembangan usaha masyarakat penerima dana bergulir tersebut karena beberapa faktor, antara lain: 1) kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengelola usahanya, belum memisahkan antara modal usaha dengan dengan keuntungan, belum memisahkan pengeluaran untuk usaha dan pengeluaran pribadi dalam rumah tangganya, bahkan ada yang terkait dengan pinjaman dana dari rentenir sehingga tidak fokus terhadap pengelolaan usahanya. Disamping itu usaha yang dijalankan tanpa manajemen yang baik, usaha

berjalan tanpa menentukan target capaian keuntungan yang diinginkan. Sasaran penerima dana UPK SPP adalah ibu-ibu rumah tangga, dimana mereka menjalankan usaha sekedar untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga, dimana suami lah sebagai sumber penghasilan utama. Mereka tetap mengutamakan pekerjaan rumah tangga yang dipandang sebagai kewajiban seorang istri mulai memasak, mengasuh anak-anak, melayani suami dan sebagainya. Dengan demikian sebagian besar dari mereka tidak memiliki target untuk mengembangkan usaha. Namun demikian tidak semua penerima dana UPK berpendapat demikian, sebagian dari mereka juga ada yang serius dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dan memanfaatkan dana pinjaman bergulir untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan pendapat Suryana (2011), bahwa untuk menjadi wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (*business vision*) yang jelas, kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang". Erlich (2007) mengatakan bahwa "Suatu usaha dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan". Menurut Sony Heru Priyanto (2009) mengatakan bahwa: "Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya". Henry Faizal Noor (2007) mengemukakan bahwa "Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis".

Selain faktor penghambat diatas, juga terdapat faktor pendukung perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir dari UPK SPP yaitu adanya program yang dibuat oleh pengurus UPK SPP dalam upaya mendukung kegiatan pemasaran, pelatihan dan pendampingan. Program pemasaran berupa mengikutsertakan masyarakat penerima dana UPK SPP dalam beberapa expo secara

bergilir, membantu memesan produk mereka dalam beberapa even seperti rapat ataupun pembuatan seragam. Program expo belum semua mendapat kesempatan karena banyaknya jumlah masyarakat penerima dana pinjaman bergilir. Program pelatihan juga diberikan secara bergilir kepada masyarakat penerima dana UPK SPP, seperti pelatihan masak, pelatihan komputer dan sebagainya. Namun pelatihan tersebut dilakukan belum merata bagi masyarakat, disamping itu masih terdapat faktor-faktor lainnya yang mendukung keberhasilan suatu usaha, kreativitas dan kemampuan inovasi dari sumber daya manusia pelaku usaha sangatlah menentukan keberhasilan usahanya.

Faktor penghambat yang ke-2, pendampingan yang masih kurang efektif dan para pendamping kurang kompeten dibidang usaha yang mereka dampingi, dikarenakan banyaknya variasi dari jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat penerima dana pinjaman bergilir. Tugas pendamping masih terbatas hanya pada penanganan angsuran pinjaman yang macet saja, walaupun hanya sebagian kecil saja, karena secara keseluruhan pinjaman dari masyarakat penerima dana dapat dikatakan tingkat pengembaliannya lancar karena dikelola dengan sistem berkelompok tanggung renteng, artinya anggota dalam satu kelompok saling menutupi pengembalian angsuran dari kelompoknya. Namun demikian, dilihat dari perkembangan usaha masyarakat penerima dana UPK SPP mayoritas lambat. Agar pendampingan efektif perlu peningkatan kemampuan dari para pendamping dan jumlah personil pendamping juga perlu ditambah sehingga bisa lebih fokus melakukan tugasnya. Pendampingan dilakukan oleh kader dalam bentuk sharing kepada masyarakat penerima dana yang memiliki masalah dalam usahanya yang menyebabkan pembayaran angsuran terlambat, namun pendampingan tersebut sebagian besar dilakukan bukan pada kemampuan mengelola usaha agar tumbuh dan berkembang. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan uluran tangan dari para mitra, baik praktisi entrepreneur atau para akademisi untuk ikut membantu masyarakat para penerima dana bergilir didalam mengelola usahanya.



Kemampuan yang diperlukan antara lain mengenai manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, berdasarkan analisis data menggunakan diagram *fishbone*, juga terdapat faktor penghambat lain dalam perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir dari UPK SPP yaitu : 1) material dalam proses produksi, antara lain keterbatasan ketersediaan bahan baku khususnya untuk produksi gerabah terbatas dalam memperoleh bahan baku tanah liat yang baik, harga bahan baku tidak stabil; 2) Metoda Pelaksanaan pemasaran, pendampingan, pelatihan, masih perlu mendapatkan perhatian dari pihak UPK SPP; 3) Mesin/peralatan, mesin yang digunakan dalam proses produksi kebanyakan masih tradisional, sehingga mengalami kekurangan kapasitas dalam produksi.

Faktor pendukung keberhasilan yang lainnya adalah faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

- 1) Lingkungan internal, berupa motivasi yang rendah dalam mengembangkan usaha karena hanya dianggap sebagai pekerjaan tambahan untuk membantu suami, memiliki hutang lain selain pinjaman UPK SPP, konflik rumah tangga yang semua itu dapat menghambat perkembangan usaha.
- 2) Lingkungan eksternal, berupa kondisi perekonomian yang sedang lesu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, banyaknya pesaing dalam bisnis yang sama dengan mereka menjadi faktor memperlambat perkembangan usaha. Mereka yang kurang inovatif akan mengalami kesulitan bersaing dengan usaha lain yang lebih inovatif. Para penerima dana UPK SPP juga akan mengalami kesulitan apabila harus bersaing dengan pengusaha-pegusaha yang lebih besar.

Faktor penentu keberhasilan usaha yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia (*people*). Orang/*People*, yaitu tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memenuhi syarat bagi pihak yang diberi tugas untuk memantau usaha dan memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima dana, serta karakter sebagian masyarakat penerima dana pinjaman bergulir yang meremehkan angsuran

sehingga pinjaman baru yg mestinya untuk pengembangan usaha tidak segera cair, sehingga perkembangan usaha menjadi terhambat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan perempuan di tingkat desa dalam wilayah Kecamatan.

1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) salah satunya PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP). PNPM MP adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Pedesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri Pedesaan adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Usaha masyarakat penerima pinjaman dana bergulir UPK SPP mengalami perkembangan. Perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir Dilihat dari sisi perkembangan usaha, 30% dari masyarakat penerima dana UPK SPP mengalami perkembangan usaha berkat pinjaman tersebut, 10% gagal dan 60%nya perkembangannya lambat. Dengan demikian, meskipun

usaha masyarakat penerima dana pinjaman bergulir UPK SPP itu berkembang, namun mayoritas perkembangannya lambat.

3. Faktor pendukung perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir dari UPK SPP adalah adanya program yang dibuat oleh pengurus UPK SPP dalam hal pemasaran, pelatihan dan pendampingan. Program pemasaran berupa mengikutsertakan masyarakat penerima dana UPK SPP dalam beberapa expo secara bergilir, membantu memesan produk mereka dalam beberapa even seperti rapat ataupun pembuatan seragam. Program pelatihan juga diberikan secara bergilir kepada masyarakat penerima dana UPK SPP, seperti pelatihan masak, pelatihan komputer dan sebagainya. Pendampingan dilakukan oleh kader dalam bentuk sharing kepada masyarakat penerima dana yang memiliki masalah dalam usahanya yang menyebabkan pembayaran angsuran terlambat.
4. Berdasarkan hasil FGD dengan BKAD, FGD dengan BP-UPK, FGD dengan pengurus UPK SPP, FGD dengan kader UPK SPP, serta FGD dengan masyarakat penerima dana UPK SPP, dapat dianalisis bahwa operasional pengguliran dana UPK SPP tergolong sukses dengan tingkat pengembalian yang lancar. Namun demikian, apabila dilihat dari perkembangan usaha masyarakat penerima dana UPK SPP mayoritas lambat.

### Saran

1. Pengurus UPK sebaiknya membantu mengkoordinir masyarakat pemanfaat dana bergulir SPP yang memiliki jenis usaha yang sama untuk bekerja sama dalam sharing informasi dalam mendapatkan bahan baku, serta membantu membuka *network* dengan pihak lain.
2. Berkaitan dengan program UPK SPP dan manajemen usaha masyarakat pemanfaat dana bergulir SPP, pengurus UPK SPP sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan pihak lain secara berkesinambungan, misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi, dimana salah satu tri darma perguruan tinggi

adalah pengabdian kepada masyarakat. Pihak perguruan tinggi dapat memberikan pelatihan secara rutin serta program pendampingan dan konsultasi bisnis, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi maupun manajemen sumber daya manusia kepada masyarakat pemanfaat dana bergulir SPP secara merata dan terjadwal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Henry Faizal, Noor, 2007, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UMKM & Industri*, Bandung, Alfabeta.
- Moleong, L.Y, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, Rimiyati, Fajarwati, "*Kewirausahaan*", 1 Edition, LP3M, 2016.
- Rahmatika, 2011, "*Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Situjuh Limo, Kabupaten Lima Puluh, Padang*" (non publikasi).
- Rimiyati dan Munawaroh 2014, "*Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha, Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta*".
- Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press.
- Sony Heru, Priyanto, 2009, *Kewirausahaan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Suryana, 2011, *Kewirausahaan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Scarborough, Norman M (2012), *Effective Small Business Management An Entrepreneurial Approach*, Prentice Hall, tenth editon, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 3, September 2012 ISSN : 2086 - 5031
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2001, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Haji Masagung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2000, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES.
- Tampubolon, Mangatas, 2006, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- <https://bpupkrj.wordpress.com/sejarah-pnpm/>
- <http://www.upkrajadesa.or.id/sejarah/>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan)
- <http://www.mediaindonesia.com/>
- <https://bantulkab.go.id/kecamatan/Kasih.html>
- [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/studi\\_terhadap\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/studi_terhadap_pemberdayaan_perempuan.pdf)
- <http://infoukm.wordpress.com> (dalam Jaka Sriyana, 2010)